



# **Analisis Supermasi Hukum dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

**Mutia Riska Faridani**

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas IBBI, Medan, Indonesia

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh supermasi hukum dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data diperoleh dari 89 responden di 28 OPD melalui kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan SEM-PLS dengan aplikasi WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan supermasi hukum tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas dapat mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik, sementara implementasi supermasi hukum membutuhkan perhatian lebih. Studi ini memberikan implikasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintah melalui penerapan prinsip good governance yaitu supermasi hukum dan akuntabilitas.

**Kata kunci:** Supermasi Hukum, Akuntabilitas, Kinerja Keuangan Daerah, Good Governance

## **Abstract**

*This research aims to analyze the influence of legal supremacy and accountability on the regional financial performance of East Tanjung Jabung Regency. Using a quantitative approach, data was obtained from 89 respondents in 28 OPDs through questionnaires. Data analysis was carried out using SEM-PLS with the WarpPLS 7.0 application. The research results show that accountability has a positive and significant effect on regional financial performance, while the rule of law does not have a significant effect. These findings indicate that increasing accountability can encourage better financial management while implementing the rule of law requires more attention. This study emphasizes the importance of strengthening financial governance through the application of good governance principles.*

**Keywords:** Rule of Law, Accountability, Regional financial performance, Good governance

## **Histori Artikel:**

Diterima 09 Desember 2024, Direvisi 02 Januari 2025, Disetujui 05 Januari 2025, Dipublikasi 13 Januari 2025.

## **\*Penulis Korespondensi:**

mutiariska@ibbi.ac.id

## **DOI:**

<https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.300>

## PENDAHULUAN

Masyarakat merasa puas dengan cara APBD dialokasikan mencerminkan kinerja keuangan daerah dapat dianggap baik. Dalam hal ini, masyarakat adalah *stakeholder* utama yang berhak untuk memastikan APBD dilaksanakan. Fenomena yang terjadi pada kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai kinerja keuangan daerah terkait alokasi APBD terdapat penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014-2016, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjutnya, tahun 2017 dan 2018 opini yang diperoleh adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah sebuah prestasi yang patut diapresiasi, karena telah terjadi peningkatan kinerja yang cukup baik bagi pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akan tetapi, pada tahun 2018 pada saat Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat predikat opini WTP, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan perlunya pembenahan beberapa strategi pengelolaan anggaran. Di antaranya sistem pengendalian internal yang perlu lebih dioptimalkan. Begitu pula pengawasan lapangan terhadap pekerjaan fisik pembangunan serta menekankan pentingnya memastikan lebih serius semua tahapan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2017 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 69.012.498.769,00, serta terdapat akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKPD pada tahun 2016, (IHPS 1 Tahun 2017).

Teori Agensi Jensen & Meckling (1976) mendukung penelitian ini. Ada kemungkinan konflik karena asimetri informasi antara agen dan principal, menurut teori agensi. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertindak sebagai agen, dan masyarakat bertindak sebagai principal. Ketika pemerintah mengelola APBD, mereka memiliki lebih banyak data daripada masyarakat sebagai pemangku kepentingan, terjadi asimetri informasi. Masyarakat tidak tahu bagaimana pemerintah bekerja karena situasi ini. Menurut teori agensi, mekanisme *corporate governance* yang baik dapat membantu perusahaan mengatasi masalah dan mengurangi konflik keagenan. Penerapan *good governance* dalam kinerja pemerintah adalah salah satu cara untuk mengatasi perbedaan ini (Haniffa & Cooke, 2002).

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh manajemen yang baik. Menurut Maulamin, Cholik, dan Alawiah (2018), Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdampak positif pada pengelolaan keuangan lembaga pemerintah. Dengan kata lain, GCG dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian Suartana & Yang (2019), baik pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan SPIP berdampak positif pada kinerja pemerintah daerah. Selain itu, Anggreni, Widanaputra, dan Putri (2018) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar dipengaruhi oleh manajemen yang baik dan kemampuan sumber daya manusia. Namun, penelitian tentang pemerintahan yang baik tidak selalu cocok dengan kinerja keuangan; akuntabilitas adalah salah satu aspek pemerintahan yang baik. Dedy (2009) melakukan penelitian tentang *good governance* dan menemukan bahwa menerapkan pemerintahan yang baik akan meningkatkan kinerjanya. Penelitian Riantiaro, pemerintahan, sementara ada bukti bahwa kinerja pemerintah dipengaruhi oleh akuntabilitas ketaatan. Badruzaman & Irna (2012) menemukan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah berkorelasi positif dengan keberhasilan pemerintahan yang baik. Namun, penelitian oleh Iswahyudi, Triyuwono, & Achsin (2016) menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik tidak berhasil karena variabel akuntabilitas tidak berdampak positif. Akuntabilitas tidak terbukti mempengaruhi kinerja, menurut Saleh dan Said (2011). Prinsip *Good Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah supermasi hukum dan akuntabilitas yang mengacu pada dua prinsip berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

## METODE

### Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Maka dari itu, dari setiap rupiah dana yang dibelanjakan harus mampu memberikan dampak untuk kepentingan publik, memenuhi kebutuhan publik, dan sesuai tuntutan publik, serta dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik (Halim & Kusufi, 2018).

### Supermasi Hukum

Menurut penelitian Perwirasari (2016), meningkatkan akuntabilitas kinerja dapat dicapai dengan menerapkan pemerintahan yang baik melalui supermasi hukum, transparansi, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Penelitian Nubatonis, Rusmiwari, & Son (2014) mengatakan dampak dari implementasi prinsip-prinsip *good governance* termasuk prinsip supermasi hukum yaitu kinerja organisasi semakin meningkat serta hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi.

### Akuntabilitas

Menurut Djamil (2014), akuntabilitas keuangan berarti bertanggung jawab atas integritas keuangan, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap hukum. Sehingga akuntabilitas keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan tahun lalu dan sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan tahun mendatang, tujuan dari penyediaan berbagai informasi keuangan yang lengkap, rinci, dan akurat. Pengukuran kinerja menggunakan alat keuangan dan non keuangan untuk mengukur akuntabilitas suatu organisasi atau lembaga dalam memberikan layanan publik yang optimal. Akuntabilitas berarti memberikan informasi yang akurat kepada publik tentang bagaimana dana digunakan. Ini termasuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Dari setiap rupiah dana yang dibelanjakan harus mampu memberikan dampak untuk kepentingan publik, memenuhi kebutuhan publik, dan sesuai tuntutan publik, serta dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik (Halim & Kusufi, 2018)

Berdasarkan tinjauan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1: Supermasi Hukum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

### Desain penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya. Penelitian ini merupakan eksplanatory research yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud menjelaskan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian *eksplanatory* dilakukan untuk memberikan penjelasan dan gambaran mengenai fenomena yang dikembangkan guna membuat suatu model. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti melakukannya dengan metode survei. Metode penelitian dengan survei dilakukan kepada anggota sampel dalam suatu populasi, dilanjutkan dengan pengumpulan data yang menggunakan kuesioner.

**Tabel 1.** Indikator Variabel

Variabel Penelitian	Indikator
Kinerja Keuangan Daerah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desentralisasi Fiskal</li> <li>Ketergantungan Keuangan Daerah</li> <li>Efektivitas PAD</li> <li>Efisiensi</li> </ol> (Zulkarnain, 2020)
Supermasi Hukum (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif</li> <li>Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum</li> <li>Adanya kesadaran dan kepatuhan kepatuhan hukum</li> </ol> (Solihin, 2007)
Akuntabilitas (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan</li> <li>Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>Adanya <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang terukur</li> </ol> (Solihin, 2007)

Penelitian ini melibatkan Aparat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada 28 OPD. Besarnya sampel dapat dihitung secara statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Sampel yang dipilih harus representatif, artinya setiap aspek populasi harus diwakili. Untuk penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan adalah 4 responden dari 28 OPD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang terdiri dari 112 responden. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. (Sekaran & Bougie, 2016). *Purposive sampling* adalah responden yang dapat memberikan informasi yang diperlukan karena hanya mereka yang memiliki informasi atau memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penelitian. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer. Pengambilan data primer terkait kinerja keuangan daerah, variabel *good governance* dan pengetahuan SDM dengan melakukan pembagian kuesioner kepada responden secara langsung diserahkan kepada beberapa anggota OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi yang telah memenuhi kriteria.

**Tabel 2.** Kriteria Sampel

No	Keterangan	Jumlah
	Jumlah OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	28
1.	Kepala OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	
2.	Sekretaris OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	
3.	Kasubag Keuangan OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	
4.	Kasubag Kepegawaian dan Umum OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	
	Jumlah sampel berdasarkan kriteria	112 (4 x 28 OPD)

Pola hubungan model struktural yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KKD = \gamma_1 SH + \gamma_2 AKT + \epsilon$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

**Tabel 3.** Hasil Deskripsi Supermasi Hukum (X1)

Indikator	1		2		3		4		5		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	0	0%	0	0%	9	10%	48	54%	32	36%	4.258
X1.2	0	0%	0	0%	21	24%	46	52%	22	25%	4.011
X1.3	0	0%	3	3%	20	22%	44	49%	22	25%	3.955
<b>Mean Variabel</b>											<b>4.075</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan hasil deskripsi jawaban responden terhadap Supermasi Hukum (X1) dengan 3 indikator diperoleh mayoritas jawaban responden adalah pilihan jawaban 4 dan jawaban 5 dengan rata-rata variabel sebesar 4,075. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan respon positif terhadap variabel Supermasi Hukum (X1).

**Tabel 4.** Hasil Deskripsi Akuntabilitas (X2)

Indikator	1		2		3		4		5		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X2.1	0	0%	1	1%	2	2%	39	44%	47	53%	4.483
X2.2	0	0%	0	0%	2	2%	44	49%	43	48%	4.461
X2.3	0	0%	2	2%	5	6%	41	46%	41	46%	4.360
X2.4	0	0%	3	3%	5	6%	52	58%	29	33%	4.202
X2.5	1	1%	2	2%	18	20%	50	56%	18	20%	3.921
<b>Mean Variabel</b>											<b>4.285</b>

Berdasarkan tabel di atas hasil deskripsi jawaban responden terhadap Akuntabilitas (X2) dengan lima indikator yaitu diperoleh mayoritas jawaban responden adalah pilihan jawaban 4 dan jawaban 5 dengan rata-rata variabel sebesar 4,285. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan respon positif terhadap variabel Akuntabilitas (X2).

**Tabel 5.** Hasil Deskripsi Kinerja Keuangan Daerah (Y)

Indikator	1		2		3		4		5		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y.1	25	28%	23	26%	16	18%	24	27%	1	1%	2.472
Y.2	2	2%	22	25%	24	27%	22	25%	19	21%	3.382
Y.3	30	34%	38	43%	19	21%	1	1%	1	1%	1.933
Y.4	2	2%	32	36%	21	24%	16	18%	18	20%	3.180
<b>Mean Variabel</b>											<b>2.742</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan hasil deskripsi jawaban responden terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y) dengan 4 indikator diperoleh mayoritas jawaban responden adalah pilihan jawaban 1 dan jawaban 2 pada indikator 1 dan 3, kemudian diperoleh mayoritas jawaban responden adalah pilihan jawaban 2 dan 4 pada indikator 2 dan 4.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dengan menguji signifikansi koefisien jalur dari *partial least square* (PLS), koefisien jalur menunjukkan besarnya pengaruh dari satu variabel eksogen terhadap variabel endogennya. Apabila nilai koefisien jalur signifikan maka dapat dinyatakan bahwa variabel eksogen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel endogennya.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

<i>Direct Effect</i>				
Hipotesis	Pengaruh	Koefisien Jalur	P Value	Keterangan
H1	X1 - Y	-0.026	0.402	Ditolak
H2	X2 - Y	0.218	0.016	Diterima

Hipotesis 1 (H1) Variabel Supermasi Hukum (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y). Hipotesis pengaruh antara variabel Supermasi Hukum (X1) terhadap variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y) diperoleh koefisien jalur sebesar -0,026 bertanda negatif dan dengan nilai p-value sebesar 0,402 ( $p > 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh antara supermasi hukum terhadap variabel kinerja keuangan daerah (Y) tidak signifikan dilihat melalui *p value* yang lebih besar dari pada 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ). Sehingga, Hipotesis 1 ditolak.

Hipotesis 2 (H2) Variabel Akuntabilitas (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y). Hipotesis pengaruh antara variabel Akuntabilitas (X2) terhadap variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y) diperoleh koefisien jalur sebesar 0,218 bertanda positif mengindikasikan hubungan keduanya searah dan dengan nilai p-value sebesar 0,016 ( $p < 0,05$ ) sehingga variabel Akuntabilitas (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y), sehingga hipotesis 2 diterima.

### Pembahasan

Hipotesis 1 menyatakan bahwa supermasi hukum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa supermasi hukum tidak berpengaruh pada kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, artinya hipotesis 6a ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nubatonis, Rusmiwari, & Son (2014) mengatakan dampak dari implementasi prinsip-prinsip *good governance* termasuk prinsip supermasi hukum yaitu kinerja organisasi semakin meningkat serta hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi. Hasil penelitian ini juga sangat bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadoko (2016) yang membuktikan bahwa budaya hukum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Kinerja keuangan yang baik merupakan salah satu cerminan dari tata kelola keuangan daerah yang baik sehingga pemerintah selalu berusaha untuk memperbaiki komponen-komponen pendukung salah satunya adalah meningkatkan aparat pemerintah dalam menaati peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa supermasi hukum tidak berpengaruh pada kinerja keuangan daerah pada OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Artinya Pemerintah Daerah belum maksimal dalam mematuhi peraturan hukum yang ada.

Kabupaten Tanjung Timur tidak menjalankan beberapa peraturan Undang- Undang yang berlaku. Salah satunya adalah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur tidak menerapkan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur tidak mempublikasikan LKPD pemerintahan Kabupaten Tanjung Timur, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian, berdasarkan hasil jawaban dari responden terdapat beberapa responden yang memilih jawaban tidak setuju atas pernyataan OPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkatkan pembinaan terhadap integritas moral, sikap, perilaku, dan memperdayakan kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus khususnya pelanggaran HAM dan kasus KKN. Hal ini mencerminkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur tidak begitu memperhatikan mengenai pembinaan terhadap integritas, moral dan memperdayakan aparat untuk menegakkan hukum terkait kasus Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Hal ini bisa mengindikasikan kemungkinan potensi terjadi *fraud* dalam

pengelolaan keuangan daerah. Terlebih, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak menerapkan prinsip transparan dengan baik yang diwajibkan oleh Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga hipotesis diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dedy (2009), Badruzaman & Irna (2012). yang membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerapkan prinsip *good governance* akuntabilitas yang berdampak positif pada kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerapkan akuntabilitas dalam menjalankan organisasi publik. Pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. Dengan menjalankan asas akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan (*disclosure*) segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut maka kualitas kinerja pemerintah daerah baik dari sisi keuangan.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Supermasi Hukum dan Akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan indikator-indikator penelitian untuk masing-masing variabel agar dapat menghasilkan penelitian yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan dan sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat ini. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang terdiri dari 28 OPD dengan total sampel sebanyak 89 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip dari *good governance* yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanjung akuntabilitas sedangkan supermasi hukum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini adalah Pengumpulan data tidak dilakukan pada saat pembagian kuesioner, tetapi peneliti mengambil setelah kuesioner diisi. Hal ini bisa menyebabkan peneliti tidak bisa memastikan apakah jawaban dari kuesioner telah dijawab oleh pihak yang sesuai dengan kriteria sampel.

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah menambah cakupan penelitian dengan menggunakan beberapa pemerintah daerah dalam satu provinsi atau menggunakan beberapa pemerintah daerah untuk beberapa provinsi agar hasil penelitian lebih menggambarkan kondisi pemerintah daerah Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan terkait keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan terciptanya keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah jika setiap OPD pemerintah daerah melaksanakan dengan tertib prinsip-prinsip *good governance* diantaranya supermasi hukum dan akuntabilitas. Seiring dengan perkembangan zaman, maka tidak menutup kemungkinan bahwa indikator keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah akan ikut berkembang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk aparat pemerintah agar selalu berupaya menciptakan kinerja keuangan yang baik demi kesejahteraan masyarakat melalui dengan menjalankan tata kelola organisasi pemerintahan yang baik. Penelitian ini

memberikan bukti empiris yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah, penerapan *good governance* agar lebih maksimal dan tertib meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- (IICG), T. I. (2015). Laporan Hasil Riset dan Pemerinkatan : *Good Corporate Governance dalam Perspektif Keberlanjutan*. Jakarta Selatan: The Indonesian Instutue for Corporate Governance.
- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial least Square (PLS) : Alternatif Struktural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi.
- Abdul, M. (2009). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdullah, & Halim. (2009). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 53-64.
- Anggreni, M. M., Widanaputra, & Putri, D. A. (2018). Pengaruh Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 22(1).
- Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Sera Implikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1-15.
- Arsyati, & Darwanis. (2008). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNPB Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 29-49.
- Asmara, J. A. (2010). Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal telaah & Riset Akuntansi* , 155-172.
- Badruzaman, J., & Irna, C. (2012). Pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal ipi* 4115, 1-22.
- Badu, Awaluddin, & Mas'ud. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, profesionalisme, Gaya Kepemimpinan, dan Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 99-113.
- Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). Public Policy in A Principal Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*, 339-352.
- Bintoro, T. (2006). *Pengantar Administrasi Pembangunan* . Jakarta: LP3ES.
- Blachard, P., & Nick, J. W. (2004). *Effective Training : System Strategy and Practices*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Bobbie, W. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Profesionalisme, Lingkungan Kerja dan Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Pengelola Keuangan (Studi Pada SKPD Kota Dumai). *JOM Fekon*, 4(1).
- Chinn, R. (2000). *Corporate Governance Handbook*. London: Gee Publishing Ltd.
- Christia, M. A., & Budi, I. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 1.
- CUI-ITB. (2004). Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Wilayah dan Kota*, 15(1).
- Curtis, S., & Wright, D. (2001). Retaining Employees- the fast track to commitment. *Management Research News* , 59-64.

- Debowski, S. (2006). *Knowledge Management*. Melbourn and Sydney: John Wiley and Son Australia, Ltd.
- Dedy, S. Y. (2009). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Jurusan Akuntansi Politeknik Pos Indonesia Bandung*, 1-28.
- Eisenhardt, K. (1989). Agency Theory : An Assesment and Review . *Academi of Management Review*, 57-74.
- Fikri, A., Biana, A., & Rr, P. M. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Komepetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). *Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan*.
- Hadoko, A. H. (2016). Tata kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 53-67.
- Haliah. (2012). Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Disertasi Doktor pada FPS UNHAS Makassar*.
- Halim, A. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. (2018). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Haniffa, R., & Cooke, T. (2002). Culture, Coporate Governance, and Disclosure in Malaysian Corporations. *Abacus*, 371-349.
- Herisistam. (2015). *Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Jakarta: UT Perpustakaan Digital.
- Hidayat, M. F., & Ghozali, M. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Hilman, Y. a., & Rahayu, W. A. (2020). Analysis Of Accountability and Transparency Of APBDES Management In Lembah Village Dolopo District Madiun Regency Of 2014-2019. *Journal of Governance and Local Politics*, 1-24.
- Indramawan, D. (2018). Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 1247-1272.
- Indriana. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 139-155.
- Iskandar, A., & Subekan, A. (2018). Pengaruh Personal Knowledge, Job Procedur dan Technology Terhadap Kinerja Pegawai Organisasi Publik. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 168-192.
- Isma, C. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 110-125.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money dan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 151-166.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 231-246.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Awnership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Nubatonis, S. E., Rusmiwari, S., & Son, S. (2014). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16-20.
- Perwirasari, F. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

- Riantiarno, Saleh, Y. M., & Said, M. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Rokan Hulu). *Pekbis Jurnal*, 3(3), 560-568.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: a skill building approach (Seventh ed)*. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd.
- Solihin, D. (2007). Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratis di Indonesia. Bandung: BAPPENAS.
- Suartana, W. I., & Yang, P. R. (2019). Pengaruh Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kinerja Pemerintah Daerah . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2).
- Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota Di Jawa Barat. *Cakrawala- Repositori IMWI*, 3(1), 61-74.